



**PERUBAHAN LEGITIMASI PENUNTUTAN MILITER DI  
INDONESIA (STUDI KASUS PEMBENTUKAN JAKSA  
AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER DI KEJAKSAAN  
RI)**

**TESIS**

**FEBRINA RAHMAWATI**

**1810622066**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**2022**



**PERUBAHAN LEGITIMASI PENUNTUTAN MILITER DI  
INDONESIA (STUDI KASUS PEMBENTUKAN JAKSA  
AGUNG MUDA PIDANA MILITER DI KEJAKSAAN RI)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**FEBRINA RAHMAWATI**

**1810622066**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : FEBRINA RAHMAWATI

NIM : 1810622066

Tanggal : 08 Juli 2022

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2022

Yang Menyatakan,



FEBRINA RAHMAWATI

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEBRINA RAHMAWATI

NIM : 1810622066

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PERUBAHAN LEGITIMASI PENUNTUTAN MILITER DI INDONESIA (Studi Kasus Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di Kejaksaan RI) Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2022

Yang Menyatakan



FEBRINA RAHMAWATI

## PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :


Nama : FEBRINA RAHMAWATI  
NIM : 1810622066  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Judul Tesis : **Perubahan Legitimasi Penuntutan Militer di Indonesia**  
(studi kasus pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana  
Militer di Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Beniharmoni Harefa, SH,LL.M.

Ketua Penguji



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., MH.

Penguji I



Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH.

Penguji II/ Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 08 Juli 2022

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan judul Perubahan Legitimasi Penuntutan Militer di Indonesia Dalam (Studi Kasus Pembentukan Militer di Indonesia( Studi Kasus Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer di Indonesia). Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua, suami, anak dan seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Jakarta, Juli 2022

Penulis

**FEBRINA RAHMAWATI**

# **PERUBAHAN LEGITIMASI PENUNTUTAN MILITER DI INDONESIA (STUDI KASUS PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER DI KEJAKSAAN RI)**

**FEBRINA RAHMAWATI**

## **Abstrak**

Institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Yuridiksi peradilan tidak melihat tindak pidana berdasarkan subyek pelaku. Namun berdasarkan delik atau kejahatan yang dilakukan. Terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) pada Kejaksaan RI dapat menjembatani kebutuhan penuntutan pidana subjek hukum sipil maupun subjek hukum militer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan legitimasi penuntutan militer di Indonesia dengan dibentuknya satuan kerja baru di Kejaksaan RI yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Penelitian ini difokuskan pada undang-undang yang berkaitan dengan struktur dan bagaimana proses atau prosedur-prosedur penegakan hukum militer dalam sistem penuntutan militer

**Kata Kunci : Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pidana Koneksitas.**

**CHANGE IN THE LEGITIMACY OF MILITARY  
PROSECUTIONS IN INDONESIA (CASE STUDY FOR THE  
ESTABLISHMENT OF A JUNIOR ATTORNEY GENERAL FOR  
MILITARY CRIMES AT THE INDONESIA ATTORNEY  
GENERAL' OFFICE)**

**FEBRINA RAHMAWATI**

***Abstract***

*Military institutions throughout the country have a special judicial mechanism known as military justice. Judicial jurisdiction does not look at criminal acts based of the perpetrator, but based on the offense or crime committed. The formation of the organizational structure and working procedures of the Deputy Attorney General for Military Crime (Jampidmil) at the Indonesian Attorney General's Office can bridge the need for criminal prosecution of subjects of civil law and subjects of military law. This study aims to describe the change in the legitimacy of military prosecution in Indonesia with the establishment of a new work unit at the Indonesia Attorney General's Office, namely the Deputy Attorney General for Military Crimes. The type of research used is normative juridical. This research focuses on laws relating to the structure and how the process or procedures for enforcing military law in the military prosecution system*

***Keywords: Deputy Attorney General for Military Crime, connectivity crime.***



## DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL .....	i
PERNYATAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	12
I.3. Tujuan Penelitian .....	12
I.4. Manfaat Penelitian .....	13
I.5. Literature Review .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
II.1. Tinjauan Umum Legitimasi, Penuntutan, dan Militer .....	17
II.1.1. Legitimasi .....	17
II.1.2. Penuntutan .....	17
II.1.3. Militer .....	19
II.2 Teori Sistem Hukum . .....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
III.1. Jenis Penelitian .....	23
III.2. Pendekatan Masalah .....	24
III.3. Sumber Data .....	25
III.4. Cara Pengumpulan Data .....	27
III.5. Teknik Analisis Data .....	27
BAB IV HASILDAN PEMBAHASAN .....	29
IV.1. Keberadaan Oditurat dalam Penanganan Perkara Pidana Umum dan Perkara Militer .....	29
IV.2. Kronologi Jampidmil .....	30
IV.3 Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer .....	32
IV.4 Pengaturan Kedudukan ndan Kewenangan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Beberapa Negara Asing .....	36
IV.5 Langkah Strategis dengan adanya Perubahan Legitimasi Penunutan Militer di Indonesia.....	38
IV.6 Reformulasi Keberadaan Peradilan Militer di Indoneisa.....	46

BAB V PENUTUP .....	54
V.1. Kesimpulan .....	54
V.2. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
RIWAYAT HIDUP	